

## Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018)

<sup>1</sup>Ali Roziqin, <sup>2</sup>Irfan Murtadho Yusuf

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

<sup>2</sup> Public Management Study Program, Universitas Utara Malaysia, Malaysia

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[aliroziqin@umm.ac.id](mailto:aliroziqin@umm.ac.id), <sup>2</sup>[irfan.murtadho@gmail.com](mailto:irfan.murtadho@gmail.com)

Received: 18 November 2019; Revised: 07 Februari 2020; Accepted: 12 Februari 2020

### Abstract

*Bidikmisi program is an effort of government policy to improve the quality of resources while preparing superior human resources in the future. Diponegoro University is a state university in Central Java Province which is one of the implementers of Bidikmisi program. This article aims to analyze how the implementation of Bidikmisi scholarship policies in Diponegoro University. This article uses a descriptive qualitative approach. The result is implementation of the policy still encountered several problems such as misdirected, the distribution of monthly allowances that are often late, convoluted bureaucracy and minimum monitoring and monitoring of relevant stakeholders. Based on these considerations, Authors tries to give advice to stakeholders namely to provide living expenses provided to students. Related to financial management training, and entrepreneurship. Increase selectivity in determining bidikmisi students. Simplify the bureaucratic process so that it does not hamper the process of disbursing monthly living expenses. Facilitating bidikmisi students with empowering programs. As well as improving the monitoring and coordination system from the department level to the university with an integrated system.*

**Keywords:** Implementation; Public Policy; Bidikmisi

### Abstrak

Kebijakan bidikmisi merupakan salah satu upaya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya sekaligus menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul di masa depan. Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu pelaksana kebijakan bidikmisi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan tersebut masih ditemui beberapa masalah seperti salah sasaran, penyaluran uang saku bulanan yang sering terlambat, birokrasi yang berbelit-belit dan minimnya monitoring serta koordinasi dari stakeholder yang terkait. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk memberikan saran kepada stakeholders yaitu melakukan penyesuaian biaya hidup bulanan yang diberikan kepada mahasiswa. Memberikan pelatihan manajemen keuangan, dan entrepreneurship. Meningkatkan selektifitas dalam penetapan mahasiswa bidikmisi. Menyederhanakan proses birokrasi sehingga tidak menghambat proses pencairan biaya hidup bulanan. Memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa bidikmisi dengan program yang sifatnya memperdayakan. Serta memperbaiki sistem monitoring dan koordinasi mulai dari tingkat jurusan hingga universitas dengan sebuah sistem yang terintegrasi.

**Kata kunci:** Impelementasi; Kebijakan Publik; Bidikmisi

Link DOI : <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.2.110-122.2019>

## PENDAHULUAN

Isu kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu hal yang *unresolved* sampai saat ini. Data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2018 per maret menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 %. Meskipun secara tren jumlahnya mengalami penurunan tapi fakta di lapangan masih sering kita temui masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai macam kebijakan atau program dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Namun, dampaknya kurang signifikan. Beberapa penelitian tentang masalah kemiskinan, salah satunya disebabkan oleh minimnya akses pendidikan. Mereka merasa kesulitan untuk mengakses pendidikan karena biaya yang cukup mahal. Dan ini terus berputar seperti lingkaran setan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31(1) bahwa pendidikan adalah hak setiap wargan Negara. Maka Negara wajib memberikan pelayanan pendidikan yang mudah dan non diskriminatif. Tidak hanya itu pendidikan juga menjadi hal penting untuk memajukan sebuah peradaban bangsa. Seperti yang pernah disampaikan oleh Nelson Mandela bahwa pendidikan merupakan sebuah kekuatan terbesar yang bisa merubah peradaban sebuah bangsa. Hal itu juga sesuai dengan situasi global yang sedang terjadi saat ini seperti revolusi industri 4.0 dan era disruption. Revolusi industri 4.0 mempunyai karakteristik meleburnya teknologi yang menghilangkan batas secara fisik, digital dan lingkungan biologis (Klaus, 2017). Namun mengenai definisi revolusi industri 4.0 masih diperdebatkan hingga saat ini oleh para ilmuwan (Lee et al., 2018). Akibatnya, peran teknologi dalam masyarakat akan sangat tinggi di masa depan. Hal ini menyebabkan manusia harus lebih pintar

dan tidak kalah dengan teknologi yang berkembang.

Padahal kita tentu ingat bahwa Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi sekitar tahun 2030. Situasi dimana jumlah angkatan kerja muda jauh lebih banyak. Jumlah angkatan kerja muda yang banyak ini apabila kualitasnya bagus akan menjadi penentu keberhasilan bangsa jika dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu semua elemen bangsa harus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemenristekdikiti) meluncurkan program kebijakan beasiswa Bidikmisi (Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Beprestasi). Bidikmisi merupakan beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi akan tetapi mempunyai potensi akademik untuk menempuh pendidikan tinggi.

Jika kita bicara tentang beasiswa pendidikan tinggi, banyak sekali pihak-pihak baik dari pemerintah pusat, daerah bahkan dari dunia usaha juga ikut membantu memecahkan masalah pendidikan. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan masih banyak masyarakat terutama dari kelompok tidak mampu belum terakomodasi dengan baik (Rahmawati, 2016) Maka dengan beasiswa bidikmisi Pemerintah berharap masalah itu dapat terselesaikan. Di samping itu melalui beasiswa pendidikan tinggi, Pemerintah berharap rantai kemiskinan akan terputus. Selain itu diharapkan akan lahir manusia-manusia cerdas dan berkarakter yang menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

Selama ini pelaksanaan beasiswa bidikmisi diserahkan oleh Perguruan Tinggi masing-masing dengan tetap berkoordinasi dengan Kementerian terkait (Kemenristekdikti). Untuk region Jawa Tengah Universitas Diponegoro adalah salah satu PTN penyelenggara beasiswa bidikmisi. Para penerima beasiswa bidikmisi ini mendapatkan beberapa fasilitas yang cukup memadai seperti SPP gratis selama 8 Semester, kemudian uang saku bulanan. Selain komponen biaya tersebut mahasiswa bidikmisi juga dibekali dengan beberapa pelatihan soft skill, seperti pelatihan kewirausahaan, ESQ (Emotional Spiritual Quotient), pembuatan PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dan pelatihan kemampuan bahasa Inggris.

Jumlah penerima beasiswa bidikmisi baik secara nasional dan di lingkungan Universitas Diponegoro hampir selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, seperti yang terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Penerima Beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro Tahun 2010-2018**

No	Tahun Angkatan	Jumlah Penerima
1	2010	225
2	2011	463
3	2012	800
4	2013	1100
5	2014	1201
6	2015	1258
7	2016	1238
8	2017	1300
9	2018	1183

Sumber: Universitas Diponegoro, 2018

Berdasarkan jumlah penerima beasiswa bidikmisi tersebut, Undip mempunyai tanggung jawab besar sebagai penyelenggara bidikmisi sebagaimana prinsip yang tertuang pada pedoman

penyelenggaraan bidikmisi yaitu 3T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Jumlah). Penerima beasiswa bidikmisi di Undip tercatat berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Meskipun mayoritas penerima bidikmisi Undip pada tahun 2017 berasal dari Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 75,50 % (Murtadho, 2018) Jumlah penerima bidikmisi pada tahun 2019 dipastikan mengalami peningkatan. Seperti yang dilansir oleh Sindonews bahwa kuota beasiswa Bidikmisi dari 85.000 mahasiswa pada tahun lalu menjadi 130.000 mahasiswa untuk tahun ini. Jumlah penerima beasiswa bidikmisi nasional yang meningkat setiap tahunnya mestinya juga disertai dengan sistem penyelenggaraan yang baik. Beberapa kampus di Indonesia baik negeri atau swasta sering mengalami kendala dalam proses penerimaannya, penyelenggaraanya dan monitoring serta evaluasinya (Risno, 2015). Tidak jarang kendala yang sering terjadi ini merugikan dan mempengaruhi kegiatan perkuliahan bagi penerima bidikmisi.

Universitas Diponegoro yang memiliki jumlah penerima beasiswa bidikmisi cukup banyak juga tidak lepas dari masalah-masalah ini. Hal itu juga sesuai dengan laporan tahunan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti tahun 2015 (Irfan, 2017). Apalagi dengan fakta bahwa setiap tahun penerima beasiswa bidikmisi Universitas Diponegoro selalu meningkat. Hal itu berpengaruh pada kompleksitas pengorganisasian implementasi beasiswa bidikmisi seperti monitoring, efektivitas dan lambatnya proses pencairan uang saku bulanan di lingkungan Universitas Diponegoro. Artikel yang hampir sama pernah di tulis oleh Rahmawati (2016) yang menulis pelaksanaan beasiswa dalam dua Universitas yaitu Universitas

Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang. Akan tetapi pada artikel tersebut juga diberikan batasan waktu dari 2010-2014.

Sementara dalam artikel lain membahas tentang dinamika pengorganisasian beasiswa bidikmisi di Universitas Maritim Ali Haji (Eldrian, 2017), yang tentu mempunyai cara dan strategi yang berbeda dengan pengelolaan beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro. Artikel lain juga membahas tentang evaluasi kebijakan beasiswa bidikmisi di Universitas Riau tahun 2010-2014 (Pardede, 2015). Apalagi Universitas Diponegoro juga merupakan salah satu perguruan tinggi berbadan hukum, yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan dan mempunyai otonom yang sedikit lebih luas dibandingkan perguruan tinggi lain. Oleh karena itu dalam artikel ini penulis merumuskan permasalahan penelitian bagaimana implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro? Selanjutnya tujuan penelitiannya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana implementasi beasiswa bidikmisi khususnya di Universitas Diponegoro. Disamping itu penulis menggunakan konsep dari Edwards III untuk menganalisis dan membahas permasalahan penelitian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sebuah penelitian yang menjelaskan masalah sosial dan yang berkaitan dengan manusia (Creswell & Clark, 2010). Penelitian ini berlokasi di Universitas Diponegoro. Beberapa informasi yang dijelaskan dalam penelitian ini didapatkan dari sumber primer dan sekunder. Beberapa informan yang dimintai keterangan adalah Direktorat Jenderal Pemberlajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekfikti, Wakil  
Copyright © 2019, Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), ISSN: 2301-573X (Print), ISSN: 2581-2084 (Online)

Rektor 1 Undip, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Mahasiswa Undip, Direktorat Bidang Kemahasiswaan Undip, Perwakilan mahasiswa dan Kamdiksi Undip. Selain itu juga didukung dengan studi pustaka dan literature yang pernah membahas mengenai beasiswa bidikmisi secara khusus.

Untuk membahas bagaimana kebijakan beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro, penulis menggunakan pendekatan kebijakan, dengan spesifik implementasi kebijakan. Pendekatan ini akan membantu penulis dalam mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik sering diartikan sebagai langkah yang dilakukan oleh stakeholder untuk memecahkan sebuah masalah. Menurut Howlett dan Ramesh (1995) menjelaskan kebijakan publik merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan, nilai dan praktik tertentu. Definisi ini juga diaminkan oleh Suwitri (2009) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah yang berupa program untuk mencapai sasaran dan tujuan. Di sisi lain Menurut Dye dalam Wirman kebijakan publik sering didefinisikan sebagai apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah (Syafri, 2012).

Adanya sebuah kebijakan publik menjadi sebuah produk nilai dan norma di masyarakat tidak terlepas dari proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik mempunyai 5 tahapan penting (Anderson, 1979). Pertama adalah agenda setting. Kedua adalah pengajuan formulasi kebijakan. Ketiga adalah adopsi, keempat adalah implementasi yaitu tahap yang melibatkan semua kegiatan yang

diperlukan untuk melaksanakan kebijakan (Berman, 1978); (Van Meter & Van Horn, 1975). Dan kelima adalah evaluasi kebijakan (Subarsono, 2012); (Dunn, 2000). Kelima tahapan itu merupakan sebuah kesatuan dan satu sistem yang tidak bisa dipisahkan.

Secara umum di Indonesia kebijakan publik yang telah dirumuskan mempunyai tujuan-tujuan yang luhur dan baik bagi masyarakat. Akan tetapi, seringkali yang menjadi permasalahan adalah pada tahap implementasi kebijakan. Menurut Dunn implementasi adalah pelaksanaan mengenai apa yang telah menjadi agenda kebijakan dan hal yang dirumuskan bersama (Dunn, 2000). Terkait dengan implementasi kebijakan (Wijayanti P & Jannah LM, 2019) mengungkapkan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi baik dari isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan. Isi kebijakan mencakup kepentingan, jenis manfaat, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya.

Sebuah implementasi kebijakan menurut Edwards III dipengaruhi oleh empat variable (Edwards, 1980). Pertama yaitu komunikasi. Sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan publik dikomunikasikan dengan organisasi atau institusi yang terlibat. Kedua, sumber daya, yaitu berkaitan dengan bagaimana kompetensi para pelaksana, anggaran dan infrastruktur yang memadai. Ketiga, Disposisi yaitu bagaimana karakteristik implementor dalam melaksanakan kebijakan. Keempat adalah struktur birokrasi, berkaitan dengan bagaimana sistem birokrasi itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa pelaksanaan dan pengorganisasian kebijakan bidikmisi ini dilakukan oleh perguruan tinggi

operasional (penyelenggara bidikmisi) masing-masing (Rahmawati, 2016); (Eldrian, 2017); (Risno H. Pardede, 2015). Dengan tetap mengacu pada mekanisme ditjendikti (Kemendikbud). Hal inilah yang bisa berdampak pada mekanisme implementasi bidikmisi di masing-masing perguruan tinggi berbeda satu sama lain. Karena antara perguruan tinggi satu dengan yang lainnya mempunyai sumberdaya dan manajemen yang berbeda. Terlebih dengan mekanisme organisasi penyaluran beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro yang mempunyai jumlah mahasiswa bidikmisi cukup banyak.

Pelaksanaan Beasiswa bidikmisi tidak hanya dilakukan di lingkungan Universitas Diponegoro, akan tetapi juga Perguruan Tinggi Negeri lainnya dan Perguruan Tinggi swasta yang mendapatkan izin atau amanah menyelenggarakan beasiswa bidikmisi. Dalam artikel ini penulis akan membahas tentang implementasi beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro sampai tahun 2018. Sebelum penulis membahas bagaimana kendala implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi di Undip. Penulis menjelaskan mekanisme dan profil beasiswa bidikmisi.

#### **A. Kebijakan Bidikmisi**

Beasiswa bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi akan tetapi mempunyai potensi akademik yang baik untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Pengelolaan beasiswa bidikmisi berdasarkan pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Bidikmisi. Dasar hukum pelaksanaan beasiswa bidikmisi adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 96 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya

Pendidikan Bidikmisi. Adapun tujuan adanya beasiswa bidikmisi adalah:

1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik.
2. Memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon/mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa baik di bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler.
4. Menimbulkan dampak positif bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif
5. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut, beasiswa bidikmisi mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi namun mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi;
2. Memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk menjadi sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, cinta

tanah air, dan semangat bela Negara;

3. Memberikan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu tapi memiliki potensi akademik yang baik untuk ikut berperan serta dalam meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi global, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diratifikasi oleh seluruh negara ASEAN.

Bagi calon mahasiswa penerima bidikmisi dipersyaratkan untuk memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan dan pedoman ini bisa berubah setiap tahun tergantung bagaimana relevansinya dengan kondisi masyarakat saat itu. Selain itu para penerima beasiswa bidikmisi juga mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur sebelumnya (baca Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 96 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Bidikmisi).

## **B. Masalah Implementasi Kebijakan Bidikmisi di Undip**

Sama halnya dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar kampus di Indonesia. Implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi di lingkungan Universitas Diponegoro juga tidak lepas dari beberapa kendala. Untuk menganalisis dan membahas beberapa kendala tersebut penulis menggunakan variable-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edwards III. Seperti yang dijelaskan berikut ini:

### *1). Komunikasi*

Kejelasan informasi yang diberikan ke penyelenggara universitas terhadap penerima bidikmisi selama ini kurang

maksimal. Jaringan komunikasi yang dibuat dari rektorat kemudian diteruskan kepada Kamadiksi (Keluarga Mahasiswa Bidikmisi) hingga tingkat jurusan tidak berjalan dengan baik. Seringkali komunikasi terkait dengan proses perkuliahan, pembiayaan, dan monitoring tidak berjalan secara efektif dan efisien. Meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh pihak kampus atau rektorat kepada seluruh penerima bidikmisi.

Kendala paling utama yang paling sering terjadi adalah pada tingkat jurusan. Pada tingkat ini dari kalangan penerima bidikmisi hanya ada sebagian kecil yang mempunyai rasa patuh. Beberapa laporan yang diminta oleh rektorat sering mengalami keterlambatan bahkan tak jarang dipenuhi oleh sebagian kecil mahasiswa karena alasan komunikasi. Seperti ketidaktahuan. Komunikasi yang berjalan kurang baik ini menyebabkan beberapa kegiatan yang diperuntukkan oleh mahasiswa bidikmisi tidak berjalan baik. Bahkan tak jarang beberapa mahasiswa tidak mengetahui tentang adanya kegiatan dari rektorat/universitas. Pihak rektorat menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari mengenai kegiatan apa saja yang harus diikuti dan kewajibannya sebagai mahasiswa bidikmisi baik itu sifatnya akademik atau pengembangan *soft skill*.

Keterlambatan mengenai berkas-berkas yang dipersyaratkan pihak kampus kepada penerima beasiswa bidikmisi merupakan salah satu mengapa proses pencairan uang bulanan bidikmisi sering telat. Apalagi jumlah mahasiswa bidikmisi yang cukup banyak. Padahal berkas-berkas tersebut menjadi prasyarat uang bulanan dicairkan. Penerima-penerima yang sering telat dalam hal administrasi ini menurut pengalaman penulis adalah karena rasa malu. Malu dianggap sebagai mahasiswa

miskin (salah sasaran). Hal itu terjadi berulang-ulang, dari dulu penulis rasakan sampai mungkin saat ini masih terjadi. Komunikasi yang tidak berjalan secara cepat dan efisien ini yang menjadi beberapa hal lain yang terkait dengan beasiswa bidikmisi juga terkena dampaknya.

## 2). *Sumberdaya*

Kapasitas SDM dari Undip dalam hal ini bagian akademik sudah cukup mumpuni. Ada sekitar 11 pegawai yang mengurus beasiswa bidikmisi. Meskipun dari pegawai ini juga mengurus beasiswa dari CSR atau pihak lain yang telah kerjasama dengan Undip. Dalam proses seleksi calon mahasiswa bidikmisi di Undip dilakukan oleh Kesma Undip bekerjasama dengan mahasiswa yang tergabung di BEM dan Kamadiksi. Namun kendala SDM dalam proses beasiswa bidikmisi ini adalah mahasiswa bidikmisi itu sendiri yang terkadang kurang memahami hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya. Masih sering kita temui bahwa calon penerima beasiswa bidikmisi memalsukan dokumen persyaratan. Sehingga ketika calon penerima itu berhasil masuk di kampus, mereka hanya memanfaatkan biaya yang mereka peroleh tanpa memperhatikan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Selain itu mengenai permasalahan salah sasaran penerima beasiswa bidikmisi. Setiap tahun dari Undip menerjunkan para surveyor baik itu dosen atau mahasiswa bidikmisi yang bersedia menjadi surveyor. Namun tidak semua daerah bisa tercover oleh surveyor. Karena terbatasnya surveyor yang bertugas. Celah inilah yang biasanya memunculkan penerima salah sasaran. Selain itu juga terkadang para surveyor ini pun kurang teliti dalam melakukan

pengecekan langsung kepada calon penerima bidikmisi.

Keterbatasan sumberdaya ini pernah dilihat langsung oleh penulis pada tahun 2014 ketika menjadi surveyor calon penerima beasiswa bidikmisi. Akhirnya terpaksa untuk wilayah susah terjangkau tidak di survey, tidak berhenti disitu beberapa calon penerima bidikmisi pun yang ada di wilayah terjangkau ada yang tidak dilakukan survey. Karena waktu dan sumberdaya yang tidak memadai. Sebagai proses gantinya dari pihak kampus biasanya melihat dari syarat administratif yang diberikan saat pertama kali mendaftar beasiswa bidikmisi. Meskipun valid, hal ini masih rawan dengan manipulasi. Dampaknya adalah ada penerima beasiswa bidikmisi yang tidak tepat sasaran.

Sedangkan jika berbicara tentang uang bulan yang diberikan oleh penerima beasiswa bidikmisi. Nominal yang bersih diterima oleh mahasiswa saat ini adalah sebesar Rp 650.000,- /bulan . Nominal ini menurut sebagian besar mahasiswa bidikmisi Undip dianggap kurang mengingat keperluan akademis yang semakin banyak seperti laboratorium, print, fotocopy, KKN (Kuliah Kerja Nyata), magang dll. Sedangkan sebagian kecil mahasiswa bidikmisi yang lain terpaksa mengalokasikan uang bulannya untuk berbisnis kecil-kecilan meskipun sangat beresiko mengganggu kegiatan perkuliahannya. Bagi prodi-prodi yang sering praktikum atau mengeluarkan bahan dan alat habis pakai, nominal ini jelas sangat kurang.

Biaya per bulan tidak ada kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2012-2016 misalnya, biaya bantuan hidup perbulan adalah sebesar Rp 600.000,- atau hanya naik Rp 50.000,- padahal para penerima beasiswa bidikmisi ini adalah kebanyakan perantau yang perlu mencari tempat tinggal sementara/kos. Sementara dari pihak

kampus sebenarnya telah memberikan slot asrama kepada para penerima beasiswa bidikmisi yaitu Rusunawa (Rumah Susun Sewa Mahasiswa) yang dipatok sekitar 250-300 rb per bulan. Praktis slot uang bulanan itu tinggal setengah. Dan dilihat dari observasi dan pengalaman penulis sebagian besar mahasiswa bidikmisi undip tidak menggunakan fasilitas Rusunawa.

Pada tahun 2018 berdasarkan kutipan yang diambil dari penelitian Irfan (2018) menyebutkan dari Kemenristekdikti mengalokasikan dana sebesar 800 juta untuk penerima beasiswa bidikmisi di Undip. Secara total dana sebesar itu terbilang cukup menurut Bagian Kesma (Murtadho, 2018). Namun permasalahannya adalah proses pencairan yang lama dan jumlah uang bulanan yang dianggap tidak relevan lagi oleh kebutuhan mahasiswa. Sehingga sebagian mahasiswa bidikmisi Undip mengusulkan untuk mengkaji ulang nominal bantuan uang bulannya dan dibahas di tingkat Kementerian.

### 3). Struktur birokrasi

Seperti keadaan birokrasi yang biasa kita temui. Birokrasi penyelenggaraan bidikmisi yang rigid dan struktur hierarki yang bertingkat-tingkat seringkali menimbulkan permasalahan tersendiri bagi implementor. Kondisi ini jelas akan merugikan penerima bidikmisi. Mulai monitoring dari tingkat jurusan, fakultas, universitas dan dinaikkan ke tingkat kementerian. Di tingkat Kementerian pun juga memerlukan proses yang sangat lama untuk proses pencairan. Bahkan keterlambatannya bisa sampai 3 bulan. Kondisi ini tentu tidak lepas dari tipe sktruktur birokrasi kita yang hierarkis. Dan implementasi bidikmisi di Undip masih dibawah tanggung jawab oleh bagian Kesejahteraan Mahasiswa, dimana bagian ini tidak hanya mengurus beasiswa bidikmisi. Ditambah lagi dengan jumlah

penerima beasiswa bidikmisi di Undip yang cukup banyak.

Jika Edwards III membagi instrumen keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah disposisi. Maka dalam penelitian ini penulis mengabungkannya dalam satu instrument yaitu struktur birokrasi, karena fenomena yang ditemukan adalah disposisi baik atau tidak itu ditentukan oleh struktur birokrasi. Oleh karena itu penarikan kesimpulannya adalah berangkat dari struktur birokrasi dalam kebijakan beasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro.

Di Indonesia tipe dan karakteristik birokralnya lebih banyak menganut konsep weber, sehingga sering disebut dengan Weberian (Dwiyanto, 2011). Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa birokrasi Weberian menimbulkan stereotip negatif dari sebagian masyarakat. Ada banyak hal penyakit birokrasi/patologi birokrasi yang menjangkit seperti, pelayanan yang buruk, korupsi, hierarkis, rigid. Ketidakmampuan birokrasi beradaptasi dengan lingkungannya juga sering dituding sebagai penyebab munculnya patologi birokrasi (Croizier, 1964). Penyakit-penyakit birokrasi mestinya harus segera diperbaiki. Apalagi di era globalisasi, keterbukaan dan teknologi, seharusnya ini menjadi lebih mudah jika ada komitmen (political will) dari pucuk pimpinan di tingkat Kementerian.

Banyak sekali tingkatan birokrasi yang harus dilewati tidak jarang calon mahasiswa bidikmisi mengundurkan diri di tengah perjalanan kuliah. Karena betapa menggantungkannya mereka terhadap pendanaan yang berasal dari bidikmisi. Selain itu tidak jarang para penerima bidikmisi menghemat pengeluaran untuk makan sehari-hari atau tugas akademik. Menurut penulis pertama yang merupakan

salah satu penerima beasiswa bikimisi rentan waktu 2012-2016, keterlambatan proses pencairan sudah sering terjadi. Mekanisme pencairannya pun sering mengalami perubahan mulai dari per 3 bulan kemudia menjadi per 6 bulan. Kondisi ini dari tingkat universitas atau bahkan kementerian tidak ada komitmen untuk melakukan perbaikan. Belum lagi terkait masalah salah sasaran karena pemalsuan data semestinya tidak terjadi lagi jika komitmen untuk memperbaiki sistem birokrasi dijalankan.

### C. Pemecahan Masalah

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan beasiswa bidikmisi di lingkungan Universitas Diponegoro harus segera diperbaiki. Permasalahan yang terjadi erat kaitannya dalam memenuhi pengeluaran sehari-hari seperti makan, minum, maupun biaya yang dikeluarkan untuk sewa tempat tinggal/rusunawa, dan secara tidak langsung dapat mengganggu proses belajar akademik. Hal itu dikarenakan minimnya uang saku yang dianggap sudah tidak relevan lagi. Penulis juga menemukan bahwa penerima bidikmisi justru dinikmati oleh mahasiswa yang tidak layak menerima beasiswa, dan bahkan putus kuliah ditengah jalan sebagai dampaknya. Perlu adanya membangun hubungan komunikasi yang erat antara dosen wali dengan mahasiswa perwaliannya sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya beasiswa bidikmisi. Dengan kemampuan finansial yang sangat terbatas, mahasiswa juga dituntut mampu mengontrol pengeluaran dari bantuan tersebut. Skema ini menjadi alasan karena kebanyakan beasiswa dari pemerintah sifatnya bukan seperti sewa (Hallman & Rosenbloom, 1993).

Masalah keuangan umumnya terjadi pada individu-individu yang tidak mampu memajemen keuangan. Pihak kampus semestinya memberikan pelatihan yang intensif mengenai manajemen finansial serta pelatihan *enterpreneurship*. Selain itu kapasitas manajemen sumber daya manusia di Universitas Diponegoro harus lebih *agile people* dan *agile process* dalam mengelola beasiswa bidimisi. Sehingga meminimalisir keterlambatan proses pencairan uang saku bulanan bagi mahasiswa bidikmisi.

### 1. Upaya Perbaikan Kedepan

Berdasarkan analisis dengan indikator komunikasi, sumberdaya dan stuktur birokrasi (Edwards, 1980). Masing-masing instrumen tersebut mempunyai variasi kendala dalam proses implementasi. Akan tetapi penulis menarik kesimpulan bahwa instrumen komunikasi dan struktur birokrasi adalah dua instrumen yang menonjol menjadi kendala implementasi bidikmisi. Implementor semestinya memberikan jaminan bahwa semua biaya kuliah bisa dipenuhi melalui beasiswa ini. Sehingga para mahasiswa penerima bidikmisi bisa fokus terhadap prestasi akademik non akademik. Struktur birokrasi dilingkungan Undip juga mesti lebih kreatif dan inovatif dalam membentuk kemandirian dan pemberdayaan bagi mahasiswa bidikmisi.

Karakteristik sebuah kebijakan adalah selalu punya tujuan, cara, dan sasaran (Samodra et al, 1994). Implementor khususnya yang berada pada struktur birokrasi harus paham apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi penyimpangan implementasi. Komunikasi yang dilakukan oleh Undip dengan Kemenristekdikti (Sekarang kemendikbud) harus mempunyai saluran

komunikasi yang jelas. Selain itu juga perlu konsisten antara informasi dari pelaksana satu dengan lainnya.

Di Era industri dan teknologi, gerakan wirausaha mesti digalakkan sedini mungkin. Dan itu bisa dilakukan semenjak di bangku perkuliahan. Pihak Undip bisa menginisiasi untuk ikut menjadi mentorship dan mengelompokkan mahasiswa bidikmisi sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga langkah ini bisa membuat kemandirian bagi mahasiswa bidikmisi. Tidak bergantung pada keuangan yang diberikan oleh Kemenristekdikti melainkan bisa memanfaatkan untuk lingkungan sekitar. Sementara untuk meminimalisasi salah sasaran pihak Undip melalui Kesma bisa melakukan visitasi di beberapa tempat dan wawancara untuk menunjang validasi data bidikmisi. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa harus melakukan visitasi secara menyeluruh. Apalagi untuk mahasiswa bidikmisi tambahan. Karena kuota bidikmisi tambahan (*on going*) inilah yang sering menjadi salah sasaran.

Berdasarkan pengalaman penulis biasanya Bagian Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) biasanya menunjuk beberapa perwakilan penerima bidikmisi untuk melakukan survei sesuai tempat tinggalnya. Meskipun penugasan ini sangat beresiko karena kredibilitas dari mahasiswa bidikmisi sendiri (*Surveyor/Senior*) belum teruji. Disamping itu juga pihak undip tidak memberikan pelatihan secara intensif sebelum menerjunkan tim surveynya. Padahal tugas *surveyor* ini sangat urgen karena dari keputusan *surveyor* ini lah hasil lapangan bisa dilaporkan ke pihak universitas. Jika saja *surveyor* ini salah memverifikasi data kemungkinan besar juga hasilnya salah. Disamping itu dengan terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang terbatas, satu tim survey yang terdiri

dari 2 atau 3 orang bisa mensurvey calon penerima bidikmisi dengan jumlah banyak. Hal ini tentu tidak efektif, sehingga kedepan pihak Undip bisa mengalokasikan tim survey dari luar mahasiswa bidikmisi untuk memenuhi kuota tim survey. Selanjutnya pihak undip juga bisa memberikan sanksi baik itu akademik atau hukum apabila menemukan penerima bidikmisi memalsukan data. Hal seperti ini bisa memberikan efek jera kepada calon penerima beasiswa bidikmisi. Sehingga mereka berlaku jujur dan integritas.

Jalur birokrasi yang selama ini lama dan panjang harus dipersingkat. Mulai dari tingkat jurusan sampai ke tingkat Universitas. Semestinya Undip bisa menganggarkan untuk membuat sebuah sistem sederhana yang terintegrasi dari BAK, Kesma, Universitas hingga ke Kementerian. Sistem ini digunakan sebagai media monitoring dan segala aktivitas dari penerima bidikmisi bisa tercatat disitu. Sistem ini hanya bisa digunakan oleh penerima beasiswa bidikmisi dengan menggunakan ID/ nomor KTM. Atau cara lain bisa dalam bentuk seperti *website*. Contoh riilnya adalah beasiswa LPDP Kemenkeu. Para penerima beasiswa bisa melakukan update data baik itu personal, akademik atau kegiatan sosial lainnya melalui *website*. Data yang terkonfirmasi di sistem *website* ini yang menjadi acuan proses pencairan uang saku. Terobosan-terobosan ini mestinya bisa dikembangkan oleh universitas-universitas yang mengelola mahasiswa bidikmisi dalam jumlah besar. Termasuk Undip. Selain menjadi lebih sederhana, pemanfaatan teknologi informasi juga akan lebih mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Sehingga proses pelaporan dari Universitas ke Kemenristekdikti juga lebih cepat.

Sistem ini juga sekaligus bisa mengurangi beban kerja Kesma Undip dan menghindari tumpang tindih antar pelaksana dalam universitas. Namun sayang, sampai saat ini hal itu belum bisa dilakukan oleh pihak Undip. Padahal jika mekanisme ini secara serius dilakukan, maka keterlambatan proses pencairan uang bulanan bisa diminimalisasi. Perlu adanya semacam *political will*, atau komitmen pimpinan untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga para penerima beasiswa bidikmisi bisa secara bebas melakukan kegiatan akademik dan pengembangan diri tanpa berpikir bagaimana mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mahasiswa bidikmisi yang kebanyakan berasal dari luar daerah akan sangat berat jika untuk uang bulanan saja sering telat. Padahal mereka sangat tergantung dengan uang itu karena keluarga mereka melepas tanggung jawab ke anak mereka setelah resmi dinyatakan sebagai mahasiswa bidikmisi.

Meskipun di tingkat Kementerian. Kemenristekdikti telah meluncurkan sistem nasional penyaluran uang bidikmisi berbasis *website* bernama Sipbesar. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai tahap mana proses pencairan uang bulanan. Akan tetapi sistem ini belum bisa mengatasi masalah utama penyaluran bidikmisi yang sering telat. Sistem ini hanya memberikan informasi secara berkala tentang bukan kepada mempercepat proses pencairan secara efektif dan efisien.

Semestinya implementor yang terkait dengan kebijakan beasiswa bidikmisi harus berinovasi. Zaman dan dinamika kehidupan terus berkembang, inovasi adalah cara untuk memecahkan masalah-masalah lama dengan pendekatan baru. Penyederhanaan sistem akan membuat pelaksanaan bidikmisi akan jauh lebih

efisien. Masalah-masalah ini sudah lama dan sering terjadi. Akan tetapi selalu berulang setiap tahun. Ribuan mahasiswa Undip mayoritas sangat menggantungkan uang bantuan bulanan. Belum lagi untuk mencukupi kebutuhan akademik seperti pada bidang sainteks yang sering melakukan praktikum hingga praktek di luar kota. Keterlambatan pencairan akan semakin menambah beban bagi mahasiswa bidikmisi. Disamping itu inovasi yang dilakukan juga berpeluang besar mengatasi masalah lain yang terkait dengan beasiswa bidikmisi.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Beasiswa bidikmisi telah mampu mewujudkan ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak Indonesia untuk dapat menikmati pendidikan tinggi dengan gratis. Kebijakan beasiswa bidikmisi merupakan program nasional yang mempunyai tujuan mulia yaitu memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan tinggi. Diharapkan para penerima bidikmisi ini selepas melanjutkan pendidikan bisa mengangkat perekonomian dan taraf kehidupan di lingkungan sekitar. Namun terlepas dari itu semua dalam implementasi di perguruan tinggi negeri atau swasta ada beberapa kendala yang sering terjadi. Implementasi beasiswa bidikmisi di Undip kurang berjalan dengan baik, seperti yang didukung oleh penelitian Rahmawati (2016). Tim pengelola dan pelaksana beasiswa bidikmisi di lingkungan Undip masih menjadi satu dengan Bagian Kesejahteraan Mahasiswa sehingga hal ini menyebabkan tumpang tindih tupoksi. Selain itu bentuk komunikasi yang ada juga belum berjalan secara optimal. Sehingga hal ini berdampak pada proses pencairan uang bulanan bidikmisi. Disamping itu juga pelaksanaan beasiswa bidikmisi di Undip

masih menyimpan beberapa kendala mulai dari tingkat pelaksana sampai pada subjek pelaksana yaitu mahasiswa penerima bidikmisi itu sendiri.

### ***Saran***

Tantangan dan permasalahan bangsa di masa depan akan semakin kompleks. Beasiswa bidikmisi sebagai beasiswa unggulan pemerintah diharapkan bisa menciptakan manusia-manusia unggul yang akan membawa perbaikan bagi bangsa dan memberantas kemiskinan. Bonus demografi yang akan kita nikmati sekitar tahun tahun 2030 akan menjadi peluang emas bagi generasi muda. Meskipun pemerintah berencana mengganti atau menghapus beasiswa bidikmisi pada tahun masuk 2020 dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar), menurut penulis mekanisme permasalahan yang akan ditemui saat implementasi KIP relatif sama.

Program beasiswa bidikmisi yang dihapus dan diganti oleh KIP (Kartu Indonesia Pintar) salah satu program strategis nasional dalam bidang pendidikan. Melalui pendidikan, anak-anak yang masuk dalam golongan menengah kebawah diharapkan bisa memperbaiki taraf kehidupan di masa depan. Oleh karena itu akses pendidikan yang menjadi basis pengetahuan di masa depan harus bisa membuka peluang selebar-lebarnya bagi semua elemen masyarakat, tanpa diskriminasi. Diharapkan implementasi program beasiswa dalam skala nasional bisa terlaksana oleh perguruan tinggi operasional secara optimal dan tepat sasaran. Sehingga, masalah-masalah yang dialami seperti putus kuliah dan tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena pelaksanaan kebijakan yang tidak bagus dapat minimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E. (1979). *Public Policy Making* (2<sup>nd</sup> ed). New York, NY:Holt, Rinchart & Winston.
- Berman, P. (1978). The study of macro- and micro-implementation. *Public Policy*.
- Creswell, J., & Clark, V. P. (2010). The foundations of mixed methods research. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*.
- Croizier, M. (1964). *The Bureaucratic Phenomenan*. Chicago: Chicago University Press.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Terjemahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Eldrian, R. P. (2017). Dinamika Dalam Manajemen Beasiswa Bidikmisi (Studi Komparasi pada Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji). In *repository.umrah.ac.id*. Retrieved from <http://repository.umrah.ac.id/317/1/Jurnal Rizkie Permata Eldrian.pdf>
- Klaus, S. W. (2017). The Global Competitiveness report 2017-2018. In *World Economic Forum*.
- Lee, M., Yun, J., Pyka, A., Won, D., Kodama, F., Schiuma, G., ... Zhao, X. (2018). How to respond to the fourth industrial revolution, or the second information technology revolution? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*. <https://doi.org/10.3390/joitmc403002>
- Murtadho, I. & A. R. (2018). *Analisis Kesesuaian Beneficiaries Pada Program Bidikmisi Di Universitas Diponegoro Semarang. Volume 7(2)*, 462-479.
- Rahmawati. (2016). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010-2014 (Studi Penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 5(4).
- Risno H. Pardede. (2015). Evaluasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi di Universitas Riau Tahun 2010-2014. *JOM FISIP*, 2(2), 1-11.
- Samodra, W. et al. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subarsono, AG. (2012). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayanti, P., & Jannah, L. M. (2019). Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di Provinsi Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 53-66.